

**DAMPAK DEREGULASI PERDAGANGAN TERHADAP PENGEMBANGAN
USAHATANI JAGUNG DI PULAU LOMBOK****THE IMPACT OF TRADE DEREGULATION ON CORN FARM
DEVELOPMENT IN LOMBOK ISLAND**

Oleh :

Hirwan Hamidi, Bambang Dipokusumo dan Anwar
Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis keunggulan komparatif usahatani jagung di Pulau Lombok, (2) menganalisis dampak deregulasi perdagangan terhadap pengembangan usahatani jagung di Pulau Lombok. Metode yang digunakan untuk menjawab tujuan tersebut adalah survei sampel terhadap petani dan pedagang jagung. Model analisis yang digunakan Analisis Matriks Kebijakan (*Policy Analysis Matriks=PAM*) yang meliputi: rasio biaya sumberdaya domestik (DRCR), koefisien proteksi input nominal (NPCI), koefisien proteksi output nominal (NPCO), dan koefisien proteksi efektif (EPC).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pengembangan usahatani jagung di Pulau Lombok memiliki keunggulan komparatif cukup tinggi seperti terlihat dari nilai DRCR 0,144; (2) dampak kebijakan pemerintah dalam subsidi input (pupuk) saat ini kurang nyata memberikan insentif terhadap petani jagung, sebab harga input yang diterima petani lebih tinggi daripada harga sosial yang seharusnya, seperti tercermin dari nilai NPCI 1,024 dan IT 49.814; (3) dampak kebijakan pemerintah dalam pasar output berpengaruh negatif terhadap harga jagung, sebab harga jagung yang diterima petani lebih rendah daripada harga sosial yang seharusnya, seperti tercermin dari nilai NPCO 0,922 dan OT -150.489; (4) dampak kebijakan pemerintah dan mekanisme pasar input-output yang berlaku kurang memberikan rangsangan (*disinsentif*) terhadap produsen jagung di Pulau Lombok, sehingga nilai tambah yang diperoleh petani, lebih rendah daripada yang seharusnya diterima, sebagaimana tercermin dari nilai EPC 0,915 dan EPR -0,198.

Kata Kunci: deregulasi, kompetitif, disinsentif

ABSTRACT

This study aims to: (1) analyze the comparative advantage of maize farming in the island of Lombok, (2) to analyze the impact of deregulation of trade to the development of maize farming in the island of Lombok. The method used to answer the purpose was a sample survey on farmers and corn traders. The analysis used the model of Matrix Analysis Policy, covering domestic resource cost ratio (DRCR), input nominal protection coefficient (NPCI), output nominal protection coefficient (NPCO), and effective protection coefficient (EPC).

The results showed that: (1) the development of maize farming in the island of Lombok has a comparative advantage is fairly high as seen from DRCR of 0.144; (2) the impact of government policies on input subsidies (fertilizer) is currently less tangible to growers of corn, because input prices received by farmers is higher than the social price that should be, as reflected in the value of IT NPCI 1.024 and 49 814; (3) the impact of government policy on output market negatively affect the price of corn, because corn prices received by farmers is lower than the social price that should be, as reflected in the value NPCO 0.922 and OT -150 489; (4) the impact of government policies and market mechanisms input-output prevailing provide less incentives for corn producers in the island of Lombok, so the added value obtained by farmers, lower than it should be accepted, as reflected in the value of EPC 0.915 and EPR -0.198.

Keywords: deregulation, competitive advantage, disincentives

I. PENDAHULUAN

Pengembangan jagung Indonesia saat ini paling tidak menghadapi dua masalah dan tantangan yang semakin mengemuka. *Pertama*, pasar dalam negeri, dalam hal ini laju permintaan komoditas jagung meningkat lebih cepat daripada tingkat produksi yang dicapai selama ini. Produksi jagung Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan (Kasryno, *et al.*, 2005). Status Indonesia dalam perdagangan jagung dunia adalah sebagai net importir. Impor jagung rata-rata meningkat 10,5% per tahun (Tangenjaya, B., *et al.*, 2003). Hal ini sebagai konsekuensi logis dari penambahan penduduk, peningkatan pendapatan, pesatnya industri perunggasan, dan kesadaran masyarakat akan gizi.

Kedua, semakin menipisnya tingkat penawaran jagung dunia, serta dihapuskannya setiap negara untuk melaksanakan deregulasi perdagangan setelah kesepakatan *Global Agreement on Tariff and Trade (GAAT)* yang ditandatangani di Marrakesh Maroko pada 15 April 1994. Dalam hal ini berbagai aktivitas ekonomi secara alamiah akan berpindah ke tempat yang daya birokratnya lebih sedikit dan biaya sosialnya paling murah. Dengan adanya dua tantangan tersebut, maka pengembangan jagung di dalam negeri dituntut harus lebih efisien dalam pemakaian sumberdaya domestik dan lebih unggul dalam kualitas dan kuantitas, sehingga dapat bersaing dengan jagung varietas impor (Sadikin, *et al.*, 1998).

Bagi Indonesia jagung merupakan komoditas pangan terpenting kedua setelah padi (Sadikin, *et al.*, 1998). Sumbangan jagung terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terus meningkat setiap tahun, sekalipun saat krisis ekonomi. Pada tahun 2000, kontribusi jagung mencapai Rp 9,4 triliun, dan pada tahun 2003 meningkat secara tajam menjadi Rp 18,2 triliun. Kondisi demikian mengindikasikan besarnya peranan jagung dalam memacu pertumbuhan subsektor tanaman pangan dan pertanian serta perekonomian nasional secara umum.

Meskipun demikian, dengan berkembang pesatnya industri peternakan, jagung merupakan komponen utama (60%) dalam ransum pakan. Diperkirakan lebih dari 55% kebutuhan jagung dalam negeri digunakan untuk pakan, sedangkan untuk konsumsi pangan hanya sekitar 30%, dan selebihnya untuk kebutuhan industri lainnya dan bibit. Dengan demikian, peran jagung sebetulnya sudah berubah lebih sebagai bahan baku industri dibanding sebagai bahan pangan (Kasryno, *et al.*, 2005).

Beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa daya saing jagung yang ditunjukkan dengan nilai DRRCR (*Domestic Resource Cost Ratio*) < 1 memberikan makna bahwa Indonesia mempunyai daya saing untuk memproduksi jagung, baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri (substitusi impor) maupun untuk tujuan ekspor. Artinya, upaya pemenuhan kebutuhan jagung domestik akan

lebih menguntungkan jika diproduksi di dalam negeri, karena biayanya lebih murah dibanding impor. Daya saing produksi jagung pada lahan sawah sama baiknya dengan di Jawa maupun di luar Jawa. Namun memproduksi jagung pada lahan sawah tadah hujan dan lahan kering di luar Jawa mempunyai daya saing relatif lebih baik dibanding di Jawa.

Penelitian yang dilakukan oleh Sadikin, *et al.*, 1998 menyimpulkan bahwa (1) pengembangan usahatani jagung di daerah Bengkulu secara ekonomi layak dikembangkan ($DRCR < 1$) untuk tujuan substitusi impor, (2) pengembangan produksi jagung untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri lebih efisien daripada dikembangkan untuk tujuan ekspor ($DRCR 1,088$), (3) dampak kebijakan pemerintah dalam subsidi input pupuk kurang berpengaruh terhadap penerimaan insentif petani, (4) dampak dari kebijaksanaan pemerintah dalam pemasaran produksi jagung kurang berpengaruh terhadap penentuan insentif harga jagung, (5) dampak kebijaksanaan pemerintah dan mekanisme pasar input-output jagung kurang memberikan dukungan insentif terhadap produsen jagung.

Penelitian dengan topik deregulasi perdagangan jagung di Nusa Tenggara Barat belum pernah dilakukan, padahal dalam rangka perluasan pengembangannya, terlebih di daerah ini sedang digerakkan penanaman jagung melalui program PIJAR sangatlah diperlukan informasi tentang kelayakan dan dampak-dampak yang timbul sebagai akibat kebijaksanaan pemerintah dalam subsidi dan mekanisme pasar input-output. Atas dasar pertimbangan tersebut, penelitian **Dampak Deregulasi Perdagangan Terhadap Pengembangan Usahatani Jagung di Pulau Lombok** perlu dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis keunggulan komparatif usahatani jagung di Pulau Lombok, dan (2) menganalisis dampak deregulasi perdagangan terhadap pengembangan usahatani jagung di Pulau Lombok.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Pulau Lombok, khususnya di Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur tahun 2015, menggunakan metode survei. Penentuan lokasi didasarkan atas pertimbangan bahwa Kecamatan Wanasaba adalah salah satu sentra produksi dan pemasaran jagung di Pulau Lombok. Sebagian besar petani di Kecamatan Wanasaba telah melakukan usaha budidaya jagung dalam waktu yang lama (lebih dari 10 tahun) sehingga sangat memahami karakteristik usahatani dan pemasaran jagung, dan jumlah pedagang besar, pedagang antar pulau dan pedagang pengumpul untuk komoditi jagung cukup banyak.

Penentuan desa lokasi penelitian dilakukan secara “purposive sampling”, dipilih dua desa dari 14 desa yang ada di Kecamatan Wanasaba, yaitu Desa Wanasaba dan Desa Mamben Daya. Penentuan 2 desa tersebut didasarkan atas pertimbangan: (a) usahatani jagung di desa sampel telah dilakukan sejak lama, lebih dari satu dasawarsa,

sehingga petani di desa ini telah mengenal secara baik karakteristik usahatani jagung; (b) pada desa sampel ditemukan pedagang pengumpul dan pedagang besar/pedagang antar pulau untuk komoditas jagung, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan industri pakan ternak.

Jumlah petani responden dalam penelitian ini adalah 30 orang ditambah dengan 6 orang pedagang jagung yang dipilih secara acak. Kriteria pemilihan petani sampel adalah: (1) sudah berpengalaman berusaha atau berdagang jagung minimal lima tahun; (2) mengushakan tanaman jagung pada musim tanam 2015; (3) petani pemilik dan atau penggarap; dan (4) melakukan pemasaran produksi jagung pipilan.

Operasionalisasi Variabel

a. Penetapan Satuan Input-Output

Bentuk satuan seluruh input yang digunakan dalam usahatani komoditas jagung adalah kilogram, kecuali untuk pupuk daun, herbisida dan pestisida cair dalam bentuk liter, sementara luasan lahan dalam hektar. Tenaga kerja dihitung dan dikonversi ke dalam satuan HOK (hari orang kerja) setara pria, sedangkan untuk satuan output digunakan kilogram.

b. Pemisahan Komponen Biaya Domestik dan Asing

Menurut Pearson, Nelson, dan Stryker dalam Suryana (1981) ada dua cara untuk memisahkan biaya ke dalam komponen domestik dan asing, yaitu pertama, dengan pendekatan langsung (*direct approach*). Pada cara pertama, setiap komponen biaya yang dapat diperdagangkan secara internasional seluruhnya dinilai sebagai komponen biaya asing. Sedangkan cara kedua, setiap input domestik yang dapat diperdagangkan (*tradable*) dinilai sebagai komponen biaya domestik dan asing. Cara pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah cara pertama. Hal ini didasarkan atas kenyataan untuk *input tradable*, bahwa jika terjadi kekurangan pasokan barang input, dapat dipenuhi dari penawaran di pasar internasional (Hutabarat *et al.*, 1997).

c. Pemisahan Komponen Biaya Tataniaga

Biaya tataniaga dalam penelitian ini adalah memperhitungkan seluruh biaya penanganan dari tingkat petani sampai tingkat pedagang besar dan pelabuhan impor/ekspor terdekat. Komponen biaya yang termasuk ke dalam biaya tataniaga tersebut adalah biaya kegiatan penyortiran, penyusutan, pengepakan, penyimpanan, bongkar muat, dan pengangkutan.

d. Penetapan Harga Sosial Input dan Output

Penentuan harga sosial komoditas perkebunan yang diteliti didasarkan pada harga batas (*border price*) yaitu harga CIF dan FOB di pelabuhan impor/ekspor ditambah dengan biaya tataniaga yang dikeluarkan dari atau sampai ke lokasi penelitian. Harga sosial tenaga kerja dalam penelitian ini dihitung sama dengan tingkat upah tenaga kerja harian lepas yang berlaku di lokasi penelitian. Demikian pula halnya dengan penentuan harga sosial benih, pupuk kandang, pupuk daun, pestisida/herbisida, dan penyusutan peralatan tani diperhitungkan sama dengan harga

pasar yang berlaku, karena pemenuhan kebutuhan input tersebut lebih ditentukan oleh pasar domestik setempat. Selanjutnya, untuk input pupuk urea didekati dengan harga FOB, dan untuk SP36, KCl, Za didekati dari harga CIF.

e. Penentuan Harga Sosial Nilai Tukar Uang

Untuk menetapkan harga sosial nilai tukar uang yang tepat adalah berkaitan dengan penentuan premium bagi valuta asing (valas). Dalam penentuan premium valas, menurut Gittinger (1982) adalah menggambarkan kesanggupan rata-rata para pemakai barang untuk membayar sejumlah tambahan biaya guna memperoleh satu unit tambahan barang yang diperdagangkan di seluruh perekonomian dunia.

Dalam analisis ekonomi, ada beberapa cara untuk memperhitungkan premium bagi valas (Squire dan Van der Tak, dalam Kadariah, 1988, Tinbergen dalam Jhingan, 1988; Gittinger, 1982 dan Djamin, 1984). Cara yang dipakai dalam penelitian ini adalah ancangan faktor konversi tunggal atau lebih dikenal dengan faktor konversi baku (*Standard Conversion factors=SCF*), yaitu dengan membandingkan semua impor dan ekspor (berdasarkan harga batas) dengan nilai-nilai berdasarkan harga domestik. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$SCF_t = \frac{Mt + Xt}{(Mt + Tmt) + (Xt - Txt)} ; SER_{sub\ t} = \frac{OER_t}{SCF_t} \dots\dots\dots 1)$$

- SCF_t = faktor konversi baku untuk tahun t
- M_t = nilai impor tahun t
- X_t = nilai ekspor tahun t
- T_{mt} = pajak impor tahun t
- T_{xt} = pajak ekspor tahun t
- OER_t = nilai tukar resmi (*official exchange rate*) tahun t
- SER_t = nilai takar bayangan (*shadow exchange rate*) tahun t (t adalah 2005)

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Analisis Matriks kebijaksanaan (*Policy Analysis Matriks=PAM*). Untuk input dan output yang dapat diperdagangkan secara internasional, harga sosial dihitung berdasarkan harga yang berlaku di pasar internasional. Untuk komoditi yang diimpor dipakai harga CIF (*Cost Insurance and Freight*) sedangkan komoditas yang diekpor dipakai harga FOB (*Free on Board*). Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Rasio Biaya Sumberdaya Domestik (DRCR)

Model ini merupakan salah satu alat untuk menilai manfaat suatu aktivitas ekonomi bagi masyarakat secara keseluruhan. DRCR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$DRCR = \frac{Bnsi}{Psi - Btsi} \dots\dots\dots 2)$$

- B_{nsi} = Biaya faktor domestik sosial
- P_{si} = Penerimaan sosial
- B_{tsi} = Biaya input tradable sosial

1. Jika koefisien DRRCR < 1 berarti aktivitas ekonomi yang dianalisis efisien dalam penggunaan sumberdaya domestik.
2. Jika koefisien DRRCR > 1 maka pemenuhan permintaan dalam negeri lebih menguntungkan jika dilakukan dengan cara impor.

2. Koefisien Proteksi Input Nominal (NPCI)

Mengukur dampak kebijaksanaan subsidi input yang diberikan pemerintah terhadap petani produsen. Secara matematik NPCI dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NPCI = \frac{Btpi}{Btsi}$$

Btpi = Biaya input tradable privat

Btsi = Biaya input tradable sosial

1. Jika Nilai NPCI > 1 mengukur dampak proteksi terhadap produsen input atau konsumen pengguna input tersebut.
2. Jika nilai NPCI < 1 mengukur dampak hambatan ekspor input atau subsidi input terhadap konsumen pengguna input.

3. Koefisien Proteksi Output Nominal (NPCO)

Mengukur dampak kebijaksanaan output dan mekanisme pasar yang diterapkan oleh pemerintah dalam sistem komoditas, diformulasikan sebagai berikut :

$$NPCO = \frac{Ppt}{Pst}$$

Ppt = penerimaan privat ; Pst = penerimaan sosial

1. Jika NPCO < 1 akibat penerapan kebijaksanaan pemerintah menyebabkan harga aktual output yang diterima petani lebih kecil dari harga sosial output yang seharusnya diterima,
2. Jika NPCO > 1 akibat adanya kebijaksanaan output tersebut harga dalam negeri, baik untuk produsen maupun konsumen menjadi lebih rendah dari harga sosial di tingkat perdagangan dunia.

4. Koefisien Proteksi Efektif (EPC)

Mengukur pengaruh kebijaksanaan pemerintah secara keseluruhan, baik kebijaksanaan output maupun input yang diterima petani, dirumuskan berikut:

$$EPC = \frac{Ppt - Btpi}{Psi - Btsi}$$

Ppt = penerimaan privat ; Btpi = biaya input tradable privat

Psi = penerimaan sosial ; Btsi = biaya input tradable sosial

1. Jika nilai EPC > 1 maka berarti dampak kebijaksanaan pemerintah adalah berupa insentif (perangsang) untuk berproduksi
2. Jika nilai EPC < 1 maka berarti disinsentif atau kurang merangsang produsen untuk berproduksi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Keunggulan Komparatif

Keunggulan komparatif di sini digunakan untuk menganalisis tingkat efisiensi ekonomi penggunaan sumberdaya domestik dari produksi jagung dalam upaya menghemat/menambah devisa melalui pengurangan impor dan menambah pangsa ekspor. Tingkat keunggulan komparatif ini ditunjukkan oleh nilai DRCR (*domestic resource cost ratio*). Dalam hal ini bila nilai DRCR < 1 memberi arti bahwa memproduksi jagung dalam negeri lebih menguntungkan dibanding dengan impor; dengan kata lain, pengembangan produksi jagung di daerah Pulau Lombok; efisien secara ekonomik (*competitiveness*). Sebaliknya jika DRCR > 1 , berarti untuk memenuhi kebutuhan jagung dalam negeri lebih menguntungkan melalui impor daripada memproduksi sendiri, sebab memproduksi jagung di dalam negeri tidak efisien dan secara regionalitas diskomparatif, dengan kata lain daya saing produk jagung domestik rendah.

Hasil analisis matriks kebijakan (PAM) memperlihatkan bahwa, dengan memproduksi jagung di Pulau Lombok dipandang dari segi ekonomi cukup efisien dalam rejim perdagangan subsidi impor (IS), seperti ditunjukkan oleh angka DRCR sebesar 0,144 (Tabel 2). Hal ini berarti, untuk memenuhi kebutuhan jagung dalam negeri lebih menguntungkan melalui pengusahaan di dalam negeri, sebab untuk memproduksi jagung di sini, hanya membutuhkan biaya sumberdaya domestik sekitar 14,4 %. Dengan kata lain, produksi jagung domestik memiliki daya saing tinggi, sebab setiap satu dolar devisa yang dihasilkan dalam usahatani jagung di Pulau Lombok mampu mendatangkan nilai tambah sebesar 0,856 dolar. Komparabelnya hasil kajian ini, berarti sejalan dengan hasil penelitian lain, seperti Suryana (1981), Rosegrant, *et al.* (1987), Simatupang dan Pasandaran (1990), Kasryno (1990), Djatiharti dan I Wayan Rusatra (1990), Rusastra, Sumaryanto dan Arti Djatiharti (1990), Adnyana dan A. Djauhari (1994), Puslitbang Tanaman Pangan (1995), Kariyasa, *et al.* (1995), Hutabarat, *et al.* (1997), dan Haryono (1998).

Tabel 1. Hasil Analisis PAM Usahatani Jagung di Pulau Lombok

Elements	Revenue	Tradable inputs	Domestic Factors			Profit
			Inputs	Labor	Depresiasi	
Private	27500168	2159106	3091480	2528986	100545	17834961
Social	29813586	2109291	2945265	2095507	100545	23723152
Divergences	-2313419	49814	146215	433478	0	-5888191

Tabel 2. Rasio Usahatani Jagung di Pulau Lombok

Rasio	Nilai
Nominal Protection Coefficient Output / NPCO [A/E]	0,922
Nominal Protection Coefficient Input / NPCI [B/F]	1,024
Private Cost Ratio / PCR [C/(A-B)]	0,296
Domestic Resources Cost Ratio / DRCCR [G/(E-F)]	0,144
Effective Protection Coefficients / EPC [(A-B)/(E-F)]	0,915
Profitability Coefficient / PC [D/H]	0,752
Subsidi Ratio to Producer / SRP [L/E]	-0,198

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, bila diurut berdasarkan peringkat efisiensi dalam memproduksi jagung untuk pola IS, maka dapat dikelompokkan kedalam empat kategori, yaitu: (1) *Paling efisien* dengan DRCCR $\leq 0,50$ yaitu provinsi Sumsel 0,370; Bali 0,429; Lampung 0,466; Sumatera 0,466; dan Kalimantan 0,472. (2) *Cukup efisien* dengan DRCCR antara 0,510 - 0,699 yaitu provinsi Jateng 0,538; Bengkulu 0,589; dan Jatim 0,698. (3) *Agak efisien* dengan DRCCR antara 0,710-0,900 yaitu provinsi Sulsel 0,714; Jambi 0,710; NTB 0,799; dan Sulawesi 0,845. (4) *Kurang efisien* dengan angka DRCCR antara 0,91 - 0,95 yaitu provinsi Jawa Barat 0,922.

Masalahnya bagaimana menciptakan iklim usahatani jagung ini dapat lebih kondusif, sebab berdasarkan data neraca perdagangan jagung Indonesia antara 2006 - 2013 ternyata negatif, sebab impor jagung meningkat 36,30 persen, sedangkan ekspor melorot sampai -7,74 persen/tahun. Bandingkan dengan neraca perdagangan jagung dunia yang impor dan eksponya dalam kurun yang sama meningkat sekitar 0,81 dan 0,98 persen/tahun. Memang, di sisi produksi dan produktivitas jagung Indonesia meningkat 1,03 dan 0,36 persen/tahun; tapi bandingkan dengan laju produksi dan produktivitas jagung dunia yang telah meningkat sekitar 1,95 dan 1,53 persen/tahun.

Jadi persoalan yang sesungguhnya ingin diungkapkan adalah, bukan saja teletak pada senjangnya produksi dan neraca perdagangan jagung Indonesia, tetapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah masih timpangnya pangsa produksi secara regional antara daerah Jawa dan luar Jawa (pangsa produksi jagung luar Jawa terhadap jagung nasional tahun 2013 adalah 40,20 %). Padahal menurut hasil penelitian, daerah luar Jawa sangat potensial sebagai kawasan pertumbuhan baru jagung dimasa depan, sebab daya saingnya lebih baik dibanding dengan daerah Jawa (DRCCR 0,37-0,47 versus 0,54-0,92), termasuk perusahaan jagung di lahan pasang surut/rawa (Lampung) yang memiliki DRCCR 0,556 (Puslibang Tanaman Pangan, 1995).

Dengan memperhatikan potensi ekonomik tersebut, maka paling tidak, terdapat dua masalah pokok yang muncul dan harus segera dipecahkan, yaitu : (1) perbaikan teknologi dan insentif berproduksi jagung di luar Jawa harus dipacu lebih cepat dan lebih baik daripada yang dicapai selama ini, dan (2) perbaikan mekanisme pasar jagung harus lebih kondusif, termasuk didalamnya kelembagaan, sarana dan prasarana pasar input/output, sampai ke perbaikan sistem pasca panen. Sebab tanpa ada upaya dan terobosan baru kearah itu, hampir mustahil swasembada dan daya saing jagung dalam negeri dapat tecapai lebih baik.

Dampak Kebijakan Harga Input

Instrumen kebijakan pemerintah yang sudah melepaskan subsidi input dan pembentukan harganya diserahkan kepada mekanisme pasar yang berlaku, menyebabkan harga yang diterima petani menjadi “lebih tinggi” daripada harga sosial yang seharusnya. Tapi masalahnya, apakah dahulu dengan kebijakan pemberian subsidi input sudah betul-betul efektif dapat meningkatkan pendapatan petani jagung di Pulau Lombok?. Untuk mengetahui seberapa jauh efektivitas kebijakan harga input tersebut dapat diukur dengan koefisien transfer input (IT), koefisien proteksi input nominal (NPCI) dan tingkat proteksi input nominal (NPRI).

Hasil analisis memperlihatkan bahwa nilai IT dan NPCI adalah positif, yaitu 49.814; dan 1,024 (Tabel 1 dan Tabel 2). Hal ini berarti bahwa pengaruh dari kebijakan pemerintah dengan pemberian subsidi input, ternyata berdampak negatif terhadap pembiayaan usahatani jagung di daerah Pulau Lombok, sebab petani yang diteliti menerima harga input sekitar 102,4 % lebih tinggi daripada harga sosialnya (Rp 49.814 atau \$ 3,69/ha). Dengan kata lain, produsen jagung di Pulau Lombok, saat ini sudah tidak lagi menikmati subsidi input (pupuk). Hal ini terjadi karena mekanisme pemasaran input menyimpang dari yang semestinya. Contoh kongkrit adalah saat itu disinyalir masih adanya diskriminasi harga pupuk antara sektor pertanian (pangan) dan sektor perkebunan; karena itu logis bila harga pupuk di daerah penelitian lebih tinggi daripada di tingkat pasar "liberal".

Ironisnya, kondisi demikian tidak terjadi di Pulau Lombok saja, tetapi terjadi juga di beberapa daerah produsen jagung lain, seperti di Sumsel, Jambi, Bali dan Bengkulu sebagaimana diperlihatkan oleh nilai NPCI dari 1,12 - 1,14 dan IT 3,05 - 22,21 (Hutabarat, *et al.*, 1997; Sadikin, *et al* 1998; Kasryno, 1990; Djatiharti dan IW. Rusastra, 1990). Bila ternyata kebijakan pemerintah melalui pemberian subsidi input seperti yang diterapkan tempo dulu, kurang ampuh untuk meningkatkan pendapatan dan memandirikan petani; dan demi untuk mencegah terjadinya pengalihan insentif (subsidi) dari petani-produsen jagung ke pihak/pelaku lain, maka hasil kajian ini “sesuai” dengan kebijakan pemerintah yang telah mencabut subsidi input (pupuk) secara gradual.

Sejalan dengan itu, hasil penelitian Puslit Sosial Ekonomi Pertanian (2013) menyatakan, pengaruh dari pengurangan subsidi pupuk berdampak positif terhadap tingkat pemakaian pupuk berimbang, sehingga produktivitas usahatani padi sawah

di Karawang meningkat dari 43 kw menjadi 45,55 kw/ha. Begitu juga kasus di negara lain, menurut Achmed (2005), dengan penghapusan subsidi pupuk dan diberlakukannya liberalisasi pasar di Banglades, secara nasional produksi padi meningkat 25,64 %, sehingga total produksi padi di sana meningkat dari 14,6 juta ton menjadi 18,4 juta ton.

Dilema memang, di satu pihak Pemerintah telah memberi bantuan subsidi pupuk (Urea) dengan harga sekitar Rp 226,276/kg, dan pupuk lain Rp 316,89/kg (Puslit Sosial Ekonomi Pertanian, 2006), tetapi kenyataan di daerah Pulau Lombok membuktikan bahwa harga pupuk yang terima petani lebih tinggi, bahkan melebihi harga pupuk di tingkat perdagangan internasional, yaitu Urea sekitar Rp 376,36/kg vs. Rp 374,08/kg, TSP Rp 572,08/kg vs. Rp 445,16/kg dan KCl Rp 600,36/kg vs. Rp 391,08/kg. Sedangkan di lain pihak, kondisi daya beli petani cenderung menurun, seperti tercermin dari rataan nilai tukar petani di Sumatera menurun dari 99,08% (Januari 1996) menjadi 92,26 % (Januari 2007; BPS, 2007).

Kembali kepada bahasan sebelumnya, dengan nilai IT 49.814 dan NPRI 10,92-17,04 menunjukkan bahwa, dalam sistem produksi jagung di Pulau Lombok saat ini telah terjadi pengalihan keuntungan dari harga input petani produsen jagung ke pihak lain (pelaku pasar input) sekitar 11 - 17%, atau secara nominal mencapai Rp 49.814/ha/musim.

Lebih tingginya harga input privat di tingkat petani dibanding dengan harga sosial, adalah berkaitan dengan dua faktor utama, yaitu; (1) Faktor kelembagaan masih terbatas; seperti lembaga pasaran input di daerah ini sangat kurang memadai, sehingga jargon tujuh tepat (tepat waktu, tepat harga, tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat sasaran, dan tepat layanan) masih jauh dari kenyataan, dan (2) Lemah dalam koordinasi dan pengawasan aparat, sehingga “oknum” tertentu lebih suka menjual pupuk ke pihak lain (diluar petani jagung/pangan), karena memang lebih menguntungkan.

Pengaruh lebih jauh dari kedua faktor tersebut muncul suatu "serendivitas" baru yaitu, dengan sistem mekanisme pasar input seperti sekarang, ternyata berdampak sosial terhadap produsen jagung di Pulau Lombok sangat dalam yaitu, mau atau tidak, suka atau pun tidak suka, petani tetap menerima "restriksi pemiskinan" dari luar dirinya. Dengan kata lain, dampak eksternalitas dari gagalnya kebijakan mekanisme pasar input modern yang diterapkan saat ini dapat memicu salah satu faktor penyebab kemiskinan petani di pedesaan. Namun demikian, bagaimanapun betulnya hasil kajian ini (andaikan benar), tetap hanya merupakan suatu fenomena lokalistik yang perlu dikaji secara lebih komprehensif.

Dampak Kebijakan Harga Output

Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kebijakan pemerintah dan mekanisme pasar output (jagung) yang berlaku sekarang, dapat dianalisis melalui koefisien dampak kebijakan proteksi harga output nominal (NPCO) dan Transfer Output (OT).

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai koefisien NPCO dan OT adalah lebih kecil dari pada satu dan negatif, yaitu 0,922 (Tabel 2) dan -2.313.419 (Tabel 1). Hal ini memberi arti bahwa, produsen jagung di Pulau Lombok telah menerima dampak negatif dari instrumen kebijakan pemerintah dan mekanisme pasar output yang berlaku sekarang, dimana harga jagung (*existing*) domestik saat ini lebih rendah daripada harga sosialnya. Dengan kata lain, kondisi harga jagung pada tingkat seperti sekarang, secara relatif belum memberikan insentif maksimal terhadap pengembangan usahatani jagung di daerah Pulau Lombok.

Lebih jauh hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa tingkat harga yang diterima produsen jagung adalah hanya 85,87-88,23 % dari harga sosialnya. Oleh sebab itu sekitar 11,77-14,13 % dari keuntungan yang seharusnya diterima produsen beralih ke pihak konsumen output, yaitu mencapai Rp 0,12-0,15 juta/ha/musim. Di pihak lain, fakta di lapangan menunjukkan rata-rata harga jagung ditingkat petani lebih rendah daripada harga sosialnya, yaitu Rp 374,73/kg berbanding Rp 431,41/kg.

Lebih rendahnya harga jagung domestik daripada harga sosial yang seharusnya adalah berkaitan dengan dua kondisi klasik, yaitu (1) Faktor kelembagaan pasar output masih tertutup dan belum berfungsi dengan baik, dan (2) Kelembagaan dan pemberdayaan kelompok tani masih lemah, sehingga informasi harga, jaringan pasar, skala dan kontinuitas produksi, belum menjadi perhatian petani.

Dalam sistem pasar output pun, secara relatif petani jagung di Pulau Lombok telah menerima dampak eksternalitas dari kegagalan mekanisme pasar jagung yang berlaku sekarang, sehingga implisit petani selalu menerima "restriksi pemiskinan" secara struktural.

Dampak Bersih Kebijakan Harga Input-Output

Untuk melihat pengaruh dari keseluruhan kebijakan pemerintah dan mekanisme pasar input-output, apakah memberikan insentif atau disinsentif terhadap usahatani jagung di Pulau Lombok dianalisis dengan koefisien proteksi efektif (EPC), dan koefisien profitabilitas (PC). Nilai EPC >1 menunjukkan dampak bersih dari kebijakan pemerintah memberikan insentif (dukungan/perlindungan) terhadap pengembangan usahatani jagung; sebaliknya nilai EPC <1 menunjukkan dampak bersih dari kebijakan pemerintah menimbulkan disinsentif terhadap pengembangan produksi jagung di daerah penelitian.

Hasil analisis EPC memperlihatkan bahwa petani jagung di Pulau Lombok (relatif) sudah tidak menikmati efektivitas perlindungan dari kebijakan pemerintah yang ada, seperti tercermin dari nilai EPC 0,915. Dengan kata lain, pengaruh instrumen kebijakan pemerintah dalam pasar input-output yang diterapkan saat ini menimbulkan dampak disinsentif terhadap pengembangan jagung di Pulau Lombok, sebab nilai tambah yang diperoleh petani (privat) lebih rendah daripada yang seharusnya diterima (sosial), yaitu hanya sekitar 91,5 %. Lebih rendahnya nilai tambah yang diperoleh petani di sini karena disebabkan oleh mekanisme pasar yang distoratif, yaitu di satu sisi petani menerima harga input 8,5 persen (NPRI) lebih tinggi

daripada harga sosial; sedangkan di sisi lain, petani juga menerima harga output 14,13 persen (NPRO) lebih rendah daripada harga sosial yang seharusnya.

Lebih rendahnya nilai tambah yang diterima petani daripada harga sosial yang seharusnya, dikondisikan (paling tidak) oleh lima faktor melingkar, yaitu: (1) Faktor kelembagaan masih terbatas. Di sini, sarana, prasarana, dan manajemen kelembagaan pemasaran hasil, pemasaran saprodi masih kurang memadai, sehingga jargon tujuh T (tepat waktu, tepat harga, tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat sasaran, dan tepat layanan) sulit terwujud, (2) Permodalan petani terbatas, sehingga posisi tawar petani lemah, baik dalam harga input, maupun harga output, (3) Kelembagaan dan keorganisasian kelompok tani lemah, sehingga segala produksi, kualitas dan kontinuitas produksi tidak menjadi perhatian penting, (4) Sikap mental bisnis petani rendah, sehingga preskripsi "keharusan-turunan" masih lebih dominan daripada keharusan "ilmu-tuntunan", oleh karenanya tingkat adopsi teknologi baru rendah dan terkadang bersikap massif (mudah menyerah dan cuek), dan (5) Masih kuatnya "subsidiisme", sehingga terkendala untuk maju dan mandiri dalam menyikapi iklim usaha yang kompetitif.

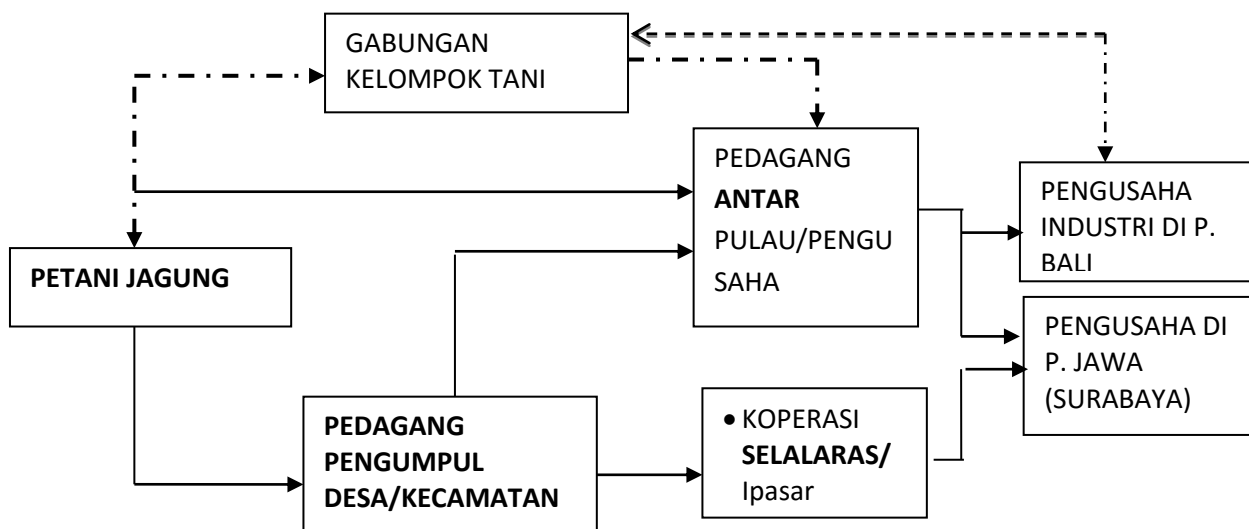
Oleh karena sudah lama melekatnya ke-lima faktor tersebut pada petani, maka dampak akhir dari kebijakan pemerintah dan mekanisme pasar yang berlaku saat ini kurang merangsang bagi pengembangan usahatani jagung di daerah Pulau Lombok, terutama dalam menanggapi ketergantungan impor jagung dari negara lain.

Beberapa hasil penelitian lain seperti yang telah disebutkan di depan memperlihatkan, bahwa hal serupa terjadi juga pada petani produsen jagung di daerah lain seperti di Jambi, Sumsel, Lampung, Sulsel, Bengkulu, dan Jabar. Bahkan terjadi pula pada petani kedelai dan kacang tanah di Pulau Lombok, Jambi, Sumsel, Jabar, Jateng, dan Jatim. Dengan instrumen kebijakan pemerintah yang telah "gagal" dalam mekanisme pasar input-output, maka dampak langsung terhadap petani-produsen jagung adalah berkurangnya nilai tambah dari yang seharusnya diterima, yaitu sebesar 16,69 persen (EPR, *effective protection rate*). Dengan kata lain, dalam perekonomian jagung di daerah Pulau Lombok telah terjadi pengalihan keuntungan dari pihak produsen jagung ke pihak lain (pelaku pasar input, output, dsb). Hal ini merupakan suatu fenomena yang menarik dan perlu dikaji secara khusus. Namun demikian, benang merah persoalan sosial-ekonomi petani menjadi jelas, yaitu mengapa petani berlama-lama menempati kubangan kemiskinan yang terstruktur tersebut (*wallahu a'lam*).

Kondisi Pasar Jagung

Pasar jagung di Pulau Lombok melibatkan berbagai kelembagaan pasar seperti kelompok tani jagung, pedagang pengumpul desa, koperasi (iPasar) dan pedagang antar pulau. Tujuan akhir dari perdagangan jagung yang berasal dari Pulau Lombok adalah Pulau Bali dan Pulau Jawa (Surabaya). Kedua lokasi pemasaran jagung tersebut memiliki karakteristik permintaan yang berbeda. Perdagangan jagung ke Pulau Bali tidak terlalu mempertimbangkan kualitas, namun pembeli jagung di

Surabaya lebih memiliki pertimbangan kualitas (kadar air dan kebersihan serta besar ukuran produk). Dari kedua karakteristik permintaan jagung tersebut menciptakan permintaan turunan ke pedagang lokal jagung yang berbeda pula. Keadaan tersebut digambarkan pada bagan saluran pemasaran dan distribusi jagung pada lokasi penelitian sebagai berikut.



Gambar 1. Bagan Saluran Pemasaran Jagung di Pulau Lombok

Keterangan: —————> Arus distribusi barang
 - - - - -> Arus informasi

Gambar 1 di atas menunjukkan bahwa terdapat dua peran kelembagaan perdagangan jagung di Desa Tembeng Putik sebagai lokasi penelitian. Kelembagaan pemasaran berupa pedagang pengumpul dan koperasi (KUD) adalah mendistribusikan jagung dari petani ke industri jagung di Bali dan Jawa. Sementara itu, Gapoktan di Desa Wanasaba dan Mamben Daya yang ada memberikan informasi ke petani dan pedagang pengumpul desa tentang adanya permintaan jagung dari pengusaha di Bali dan Gapoktan menyarankan agar petani di lokasi penelitian menjual jagungnya ke pedagang pengumpul setempat. Dari jasa yang ada Gapoktan mendapat insentif dari pedagang pengumpul setempat. Informasi tentang permintaan jagung yang diterima oleh Gapoktan di daerah penelitian hanya bersumber dari pengusaha-pengusaha di Pulau Bali dan belum pernah menjalin komunikasi dengan pengusaha-pengusaha di Jawa Timur.

Pedangan pengumpul besar yang ada pada daerah penelitian sebanyak tiga orang. Pedagang pengumpul/pedagang antar pulau tersebut juga berperan mengumpulkan jagung dari beberapa kecamatan sentra produksi jagung seperti Kecamatan Pringgabaya, Wanasaba dan Aikmel. Jagung yang terkumpul diperdagangkan ke Pulau Bali dan Pulau Jawa (Jawa Timur).

Selain itu, Gapoktan pernah menerima informasi dari *iPasar* mengenai permintaan jagung (Koperasi Selaras), namun mengingat persyaratan kualitas yang

diinginkan tidak mampu dipenuhi oleh petani setempat, sehingga membuat arus komunikasi terputus dan akhirnya tidak terjadi kerjasama atau kemitraan. Petani melalui kolektor dan Gapoktan akhirnya tetap menjalin kerjasama dengan pedagang pengumpul/pedagang antar pulau pada daerah penelitian. Jalinan tersebut sangat kuat, karena harga yang diterima petani relatif stabil.

Dari gambar di atas juga terlihat bahwa permintaan akhir jagung adalah pengusaha industri di Pulau Bali dan Surabaya. Bentuk permintaan akhir jagung adalah berupa jagung pipilan kering dengan kadar air 14% (Surabaya) dan kadar air 16%-17% (Pulau Bali). Perbedaan karakteristik permintaan akhir jagung tersebut memiliki implikasi berkembangnya pengusaha lokal yang khusus memasarkan jagung ke Bali dan atau Surabaya.

Kelembagaan pasar jagung di Pulau Lombok terdiri dari dua level yaitu level pertama terdiri dari pedagang pengumpul desa/kecamatan dan kelompok tani jagung (Gapoktan). Kemudian pada level ke dua terdiri dari pengusaha/pedagang antar pulau yang terdiri dari pengusaha umum, Koperasi Unit Desa dan Koperasi/iPasar. Aktivitas kelembagaan level satu umumnya hanya menampung jagung dalam bentuk tongkol kering dan mendistribusikannya kelembagaan pasar pada level 2. Namun terdapat juga kelembagaan pasar pada level satu melakukan proses pemipilan dan baru kemudian didistribusikan kelembagaan pasar level 2.

Untuk proses pendistribusian jagung, baik dalam bentuk tongkolan atau pipilan secara umum biaya pengangkutannya ditanggung oleh kelembagaan pasar level 2. Kelembagaan level satu hanya menampung jagung dalam bentuk tongkolan dan atau pipilan. Namun terdapat juga kelembagaan level 1 mendistribusikan jagung dalam bentuk pipilan ke kelembagaan level 3 (di Pulau Bali dan Surabaya). Kelembagaan pasar (pedagang antar pulau) pada level 3 mendistribusikan jagung dalam bentuk pipilan dan pemilahan kualitas jagung. Jagung pipilan dengan kualitas yang lebih baik dipasarkan ke Surabaya, sedangkan jagung pipilan dengan kualitas yang relatif kurang baik dipasarkan ke Pulau Bali.

Kemampuan dari kelembagaan pedagang antar pulau tersebut menampung dan mendistribusikan jagung ke luar dari Pulau Lombok hampir sama sekitar 60%-70%. Meskipun secara finansial pedagang antar pulau memiliki kemampuan finansial yang cukup, namun dikarenakan karena harga pembelian yang hampir sama, maka sering sekali target yang direncanakan tidak terpenuhi. Salah satu contoh dan realistis adalah kelembagaan pasar berupa iPasar yang berada di Kecamatan Pringgabaya hanya mendapat suplai jagung dari pedagang (pengusaha) dan KUD sebesar 70% saja. Target yang direncanakan sekitar 100 ton, namun yang dicapai hanya 70 ton.

Struktur Pasar Jagung

Struktur pasar dalam konsep ekonomi terdiri dari pasar persaingan sempurna, pasar oligopoli dan monopoli serta pasar oligopsoni dan monopsoni. Pembagian struktur pasar tersebut ditentukan atas dasar kesempurnaan informasi, jumlah penjual dan pembeli serta homogenitas produk. Semakin sempurna informasi yang diterima

oleh penjual dan pembeli, maka struktur pasar tersebut mendekati ke pasar persaingan sempurna. Sebagai implikasi kondisi tersebut, baik penjual atau pembeli sangat sulit menentukan keuntungan atau harga, sehingga harga komoditas yang diperdagangkan ditentukan oleh pasar.

Dalam konteks pasar jagung di Pulau Lombok, kondisi yang ada menunjukkan bahwa kelembagaan pasar sebagai pembeli jumlahnya sangat terbatas, informasi dari harga cukup sempurna sampai pada level pedagang antar pulau, produk yang diperdagangkan dapat dikatakan homogen (jagung dalam bentuk tongkol atau pipilan kering) dan harga hampir sama pada masing-masing level kelembagaan pasar. Implikasinya adalah petani/produsen sangat sulit memilih pembeli/pedagang yang memberikan keuntungan lebih. Demikian juga pada pihak kelembagaan pasar, hampir tidak mampu menentukan harga beli untuk meraih keuntungan yang lebih. Hal ini disebabkan karena keawatiran pembeli/pedagang bila salah satu pedagang tersebut menetapkan harga yang lebih rendah dari maka produsen/petani akan mengalihkan penjualan jagungnya ke pedagang lainnya. Selain itu, keadaan tersebut juga diikuti oleh gejala share pemasaran yang hampir sama antar kelembagaan pasar dan konsentrasi rasio dari jumlah volume pembelian antar pedagang pada masing-masing level kelembagaan pasar yang hampir sama.

Berangkat dari kondisi/keberadaan kelembagaan pasar dan gejala yang ada dikaitkan dengan karakteristik pasar (konsep teori), maka struktur pasar jagung yang ada di Pulau Lombok termasuk dalam kategori oligopsoni dengan karakter bahwa jumlah produsen cukup banyak, sedangkan pembeli terbatas, harga hampir sama pada setiap level kelembagaan pasar dan kedua belah pihak sangat sulit memperoleh kelebihan keuntungan melalui pengaturan harga serta share dan konsentrasi rasio yang hampir sama.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, secara ekonomik memproduksi jagung di Pulau Lombok efisien dan menguntungkan. Secara spesifik kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengembangan usahatani jagung di Pulau Lombok memiliki keunggulan komparatif cukup tinggi seperti terlihat dari nilai DRCR 0,144.
2. Dampak dari instrumen kebijakan pemerintah dalam subsidi input (pupuk) saat ini kurang nyata memberikan insentif terhadap petani jagung, sebab harga input yang diterima petani lebih tinggi daripada harga social yang seharusnya, seperti tercermin dari nilai NPCI 1,024 dan IT 49.814.
3. Dampak dari instrumen kebijakan pemerintah dalam pasar output saat ini, berpengaruh negatif terhadap harga jagung, sebab harga jagung yang diterima

petani lebih rendah daripada (harga social) yang seharusnya, seperti tercermin dari nilai NPCO 0,922 dan OT -150.489.

4. Dampak bersih dari instrumen kebijakan pemerintah dan mekanisme pasar input-output yang berlaku saat ini kurang memberikan rangsangan (insentif) terhadap produsen jagung di Pulau Lombok. Sehingga nilai tambah yang diperoleh petani, lebih rendah daripada yang seharusnya diterima, sebagaimana tercermin dari nilai EPC 0,915 dan EPR -0,198.
5. Ditemukan bahwa struktur pasar jagung adalah oligopsoni dan melibatkan beberapa kelembagaan pasar seperti, pedagang antar pulau, pedagang pangumpul desa, koperasi jagung dan kelompok tani.

Rekomendasi

1. Pengembangan usahatani jagung dalam rangka menyikapi iklim globalisasi ekonomi, sebaiknya diarahkan kepada daerah-daerah potensial yang memiliki keunggulan komparatif lebih baik, guna dapat mengurangi ketergantungan impor jagung Indonesia. Upaya tersebut bisa dilakukan melalui kemitraan usaha yang progresif dan terbuka, atau melalui suplai pasokan bibit jagung unggul hibrida dan pupuk dengan harga yang terjangkau petani.
2. Perlu adanya terobosan baru dalam instrumen kebijakan pemerintah dan mekanisme pasar input/output, sehingga mampu memecahkan dualisme struktur ekonomi yang lebih berpihak kepada petani. Dengan begitu, diharapkan petani jagung akan lebih bergairah untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahanya, sehingga restriksi pemiskinan petani dapat dicegah. Hal ini dapat diupayakan melalui sistem pasar yang adil dan terbuka dengan sistem kontrol yang ketat dari pihak pemerintah.
3. Perlu adanya rangsangan iklim usaha yang kondusif bagi investor untuk bergerak dalam agroindustri jagung di Pulau Lombok, sehingga diharapkan akan mampu membangun kepastian pasar bagi petani produsen dan ketersediaan produksi bagi konsumen jagung. Hal ini dapat dilakukan dengan penyempurnaan sarana dan prasarana, imprastruktur dan supra struktur yang reformatif, efektif dan efisien.
4. Untuk meningkatkan pengembangan usahatani dan pasar jagung diperlukan intervensi pemerintah yang mampu mendekatkan pasar kepada petani melalui kemitraan kelembagaan pasar. Kemudian selain itu diperlukan peningkatan kapasitas kelompok dalam mengakses informasi pasar berbagai komoditas, khususnya komoditas jagung. Selain itu disarankan bahwa melalui komunikasi Gapoktan seharusnya pedagang antar pulau menyediakan bibit, pupuk dan pestisida serta permodalan kepada petani jagung kepada petani jagung sehingga usaha tani jagung berkembang dan jaminan kualitas jagung menjadi terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Fernando, 2009. Analisis Daya Saing dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ekspor Jagung Indonesia di Pasar Malaysia Pra dan Pasca Krisis Ekonomi. Abstrak, Tesis. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Hadi Prayogo U. 1998. Dampak Deregulasi Perdagangan terhadap Usahatani Kedele di Jawa Timur. *Dalam Achmad Suryana, et al. (peny) Prosiding Dinamika Ekonomi Pedesaan dan Peningkatan Daya Saing Sektor Pertanian*. Puslit Sosek Pertanian Badan Litbang Pertanian, Bogor (p.112-132).
- Haryono Dwi. 1998. Keunggulan Komparatif dalam Produksi Palawija Pada Lahan Kering di Propinsi Lampung. *Dalam Jurnal Sosio Ekonomika Vol.4 No.10*, Juni 1998. Fakultas Pertanian, UNILA, Lampung (p.61-67).
- Hutabarat B., Djauhari, Agustian, Permata, Rachman, Sadikin, dan Situmorang. 1997. Potensi dan Peluang Pemanfaatan Sumberdaya Produksi Tanaman Pangan di Luar Jawa. *Puslit Sosial Ekonomi Pertanian*. Badan Litbang Pertanian. Departemen Pertanian, Bogor.
- Iriany, R.N., M. Yasin, H.G. Andi Takdir M, 2004. Asal, Sejarah, Evolusi dan Taksonomi Tanaman Jagung. Balai Penelitian Tanaman Serealia, Maros.
- Kadariah. 1988. Evaluasi Proyek Analisis Ekonomis (Edisi kedua). Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Kariyasa, K., Adnyana, dan W.Sudana. 1995. Dampak Mekanisme Pasar dan Kebijakan Pemerintah terhadap Pengembangan Usahatani Jagung di Jawa Tengah. *Dalam Zaini et al. (Peny). Sistem Usahatani Berbasis Tanaman Pangan: Keunggulan Komparatif dan Kompetitif*. Puslitbang Tanaman Pangan Badan Litbang Pertanian, Bogor (p.26-35).
- Kasryno, F., E. Pasandaran, dan A.M. Fagi. 2005. Dinamika produksi dan pengembangan sistem komoditas jagung Indonesia. *Dalam: F. Kasryno, E. Pasandaran, dan A.M. Fagi (Eds.). Ekonomi jagung Indonesia, cet. II*. Badan Litbang Pertanian. Jakarta.
- Kasruno, F., E. Pasandaran, Suyamto, Made O., Adnyana, 2006. Gambaran Umum Ekonomi Jagung Indonesia. Balai Penelitian Tanaman Serealia Jakarta.
- Monke, E.A. and S.R. Pearson, 1995. *The Policy Analysis Matrix for Agricultural Development (2nd edition)*. Cornell University Press. Ithaca and London.
- Puslitbang Tanaman Pangan. 1995. Studi Sumber Pertumbuhan Produksi Jagung di Provinsi Lampung, Sulawesi Selatan dan Jawa Barat. Puslitbang Tanaman Pangan Kerjasama dengan PKP2N Badan Litbang Pertanian, Bogor.
- Riyadi, 2007. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Jagung di Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan. Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sadikin, I., B. Hutabarat, dan A. Jauhari, 1998. Dampak Deregulasi Perdagangan Terhadap Pengembangan Usahatani Jagung di Bengkulu. *Dalam Prosiding Dinamika Ekonomi Pedesaan dan Peningkatan Data Saing Sektor Pertanian*, Puslit Sosial Ekonomi Pertanian, Balitbang Pertanian, Deptan, Jakarta.
- Zubachtirodin, Pabbage, dan Subandi, 2009. Wilayah Produksi dan Potensi Pengembangan Jagung. Balai Penelitian Tanaman Sereal Maros. Sulawesi Selatan.